

Memori Kehidupan Sosial-Ekonomi Istri Pejabat di Indonesia pada Masa Orde Baru dalam Lagu *Tante Sun* Karya Bimbo

Vajar Prasetya Bangun¹ Rahayu Hardita Dwi Widyanti², Hendi Irawan³

^{1,2,3} Universitas Indraprasta PGRI

*Penulis Korespondensi: vajarprasetya32@gmail.com¹ r.hardita90@gmail.com²,
hendiirawankesos@gmail.com³

Abstract. *The study of memory has been widely developed in Indonesia, and as the longest-running government, the New Order, led by Suharto, left many memories in the minds of the Indonesian people. The New Order was a dynamic period. Various policies implemented by the New Order government often drew criticism from various levels of Indonesian society. However, since direct criticism was banned by the New Order government, the public found new ways to criticize the policies and behavior of political elites, one of which was through the use of songs and poetry. The song "Tante Sun" by the music group BIMBO is one such song that contains criticism of the wives of officials during the New Order. Using pragmatic semantics, the author illustrates how the song "Tante Sun" serves as a monument that restores people's memories of the lifestyles of officials' wives in New Order Indonesia.*

Keywords: *New Order, Tante Sun, Memory Studies, BIMBO, Indonesian Women*

Abstrak. Kajian mengenai studi memori atau ingatan telah banyak dikembangkan di Indonesia, dan sebagai masa pemerintahan terlama, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto meninggalkan banyak kenangan dalam benak masyarakat Indonesia. Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang dinamis. berbagai kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru seringkali mengundang kritik dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, namun sejak kritik secara langsung dilarang oleh pemerintah Orde Baru, masyarakat menemukan cara baru untuk mengkritik kebijakan atau perilaku para elit politik, salah satunya dengan menggunakan lagu dan puisi. Lagu *Tante Sun* karya grup musik BIMBO merupakan salah satu lagu yang berisikan kritik terhadap istri para pejabat pada masa Orde Baru. dengan menggunakan semantik pragmatis, penulis menggambarkan bagaimana lagu *Tante Sun* mampu menjadi monumen yang akan mengembalikan ingatan masyarakat mengenai gaya hidup istri dari pejabat di Indonesia Orde Baru.

Kata kunci: Orde Baru, *Tante Sun*, Studi Memori, BIMBO, Wanita Indonesia

1. LATAR BELAKANG

John Tosh (Tosh, 1984) seorang sejarawan Inggris mengatakan, "History is collective memory, the storehouse of experience through which people develop a sense of their social identity and their future prospects." Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Louis Gottschalk (Gottschalk, 2015), "Every man His Own Historian." Setiap manusia dewasa dapat menjadi sejarawan, terlebih bagi dirinya sendiri.

Hal ini dikarenakan sebagai manusia, kita telah melewati berbagai peristiwa penting yang telah terjadi, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam lingkungan sosial masyarakat.

Hal serupa berlaku pula bagi kaum wanita di Indonesia. Kehidupan kaum wanita di Indonesia seolah selalu berada di kelas nomor dua. Dalam penulisan sejarah Indonesia, kaum wanita masih belum banyak ditampilkan. Meskipun dalam buku-buku sejarah telah banyak ditemukan tokoh-tokoh atau pahlawan wanita, namun perannya lebih banyak tampil sebagai pendamping bagi suaminya. Sebagai sebuah negara yang menganut sistem patriarkat, ide mengenai wanita lebih lemah dari laki-laki senantiasa berkembang dan dipertahankan di Indonesia sejak masa Hindu Budha sampai Indonesia merdeka. Berbagai kisah mengenai pengorbanan kaum wanita atau terjunnya wanita ke ranah peperangan fisik tidak terlepas dari tugasnya dalam mendampingi sang suami.

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kesadaran kaum wanita terhadap pentingnya peran wanita di ranah publik mulai terbangun. Hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya berbagai organisasi wanita, mulai dari yang berkontribusi terhadap perang fisik seperti Laskar Wanita Indonesia (LASWI) hingga terbentuknya Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang menjadi organisasi induk dari berbagai organisasi wanita di Indonesia (Sulasmi, 2021). Terbukanya pemerintah terhadap pendirian organisasi-organisasi wanita Indonesia pada masa Orde lama mengakibatkan tumbuh dan menjamurnya organisasi kewanitaan. Hampir seluruh organisasi masyarakat baik yang bergerak di bidang sosial maupun politik, memiliki sayap organisasi yang menampung istri dari para aktivis tersebut. Hal tersebut mendorong kaum wanita untuk lebih aktif dalam menyuarakan kepentingannya.

Kemunculan sosok aktivis wanita yang tidak hanya bergerak di bidang sosial namun juga bergerak di bidang politik pada masa Orde Lama menyebabkan Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mengambil sikap berhati-hati terhadap gerakan kaum wanita di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan memperkuat organisasi kewanitaan di Indonesia yang telah dibentuk pada masa pemerintahan Soekarno seperti Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharmawanita. Melalui kedua organisasi yang bersifat terstruktur ini, pemerintah memiliki peluang besar untuk mengendalikan gerakan wanita di Indonesia (Amaliatulwalidain & Kencana, 2019).

Dibalik euforia PKK yang seolah memberikan ruang bagi kaum wanita untuk menunjukkan eksistensinya di ranah publik, kehadiran PKK justru mendapatkan banyak kritik. Program-program PKK yang terfokus kepada urusan rumah tangga, mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa PKK hanya lah alat untuk mengembalikan citra wanita Indonesia kepada citra wanita pada masa feodal. Wanita pada masa feodal diketahui memfokuskan diri untuk menjadi istri dan ibu yang bertugas mendampingi suami. Kehidupan istri para pejabat pada masa Orde Baru yang diketahui aktif dalam berbagai kegiatan baik sosial, politik maupun ekonomi menyebabkan timbulnya kritik dari masyarakat.

Pada masa Pemerintahan Orde Baru, masyarakat tidak diperbolehkan memberikan kritik tajam kepada pemerintah, hal ini dikarenakan Presiden Soeharto selaku pemimpin Orde Baru sedang gencar-gencarnya menegakkan stabilitas sosial, politik dan ekonomi. Dalam kurun waktu 1970an-1980an, ada Sembilan surat kabar yang dilarang terbit karena dianggap merongrong kekuasaan pemerintah Orde Baru (Said, 1988). Hal ini mengakibatkan muncul dan berkembangnya lagu-lagu yang liriknya berisikan kritik terhadap pemerintah Orde Baru. salah satu lagu yang berisi kritik terhadap Pemerintah Orde Baru adalah lagu berjudul Tante Sun karya Bimbo. Lagu tersebut sempat dilarang beredar pada masa Orde Baru karena dianggap sarat akan kritik.

Setelah Orde Baru runtuh, masyarakat mendapatkan kebebasan untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi. Dengan kebebasan yang berlaku pada saat ini, lagu-lagu yang sempat dilarang terbit pada masa Orde Baru, bisa secara bebas didengarkan oleh masyarakat. sebagai sebuah lagu yang berisi kritik sosial lainnya, lagu Tante Sun karya Bimbo menggambarkan apa yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana lagu Tante Sun karya BIMBO dapat mengembalikan ingatan masyarakat terhadap kehidupan istri para pejabat pada masa Orde Baru.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau yang lebih dikenal dengan metode sejarah. Kuntowijoyo (Kuntowijoyo, 2013) menjelaskan tahapan penelitian sejarah sebagai berikut; heuristik (pengumpulan sumber), Heuristik merupakan proses pencarian sumber-sumber yang akan digunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Dalam penelitian sejarah, sumber sejarah terbagi menjadi dua; sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan dari bentuknya, sumber sejarah terbagi menjadi sumber sejarah lisan, tulisan dan benda.

Dalam penelitian ini, untuk heuristik atau pengumpulan sumber tidak hanya dilakukan dengan studi Pustaka untuk mendapatkan sumber berupa berita dari surat kabar sezaman, namun juga dengan metode wawancara. Hal ini dikarenakan topik yang diambil oleh peneliti adalah memori kolektif. Memori kolektif bicara tentang ingatan masyarakat di suatu daerah. Kedua cara tersebut dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan sumber primer bagi penelitian ini. Adapun sumber sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

Langkah selanjutnya adalah kritik (verifikasi kebenaran dan tingkat keabsahan sumber). Pada tahapan kedua ini, peneliti melakukan kritik sumber dengan memverifikasi data yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan koreksi silang antara sumber sezaman dengan hasil wawancara. Dengan cara tersebut, secara tidak langsung, peneliti juga melakukan kritik dan koreksi terhadap sumber sekunder. Langkah ketiga adalah interpretasi (penafsiran dan analisis penulis terhadap sumber). Dalam langkah ini, peneliti mulai membangun fakta dari data yang telah

didapatkan oleh peneliti di lapangan. fakta yang ada kemudian disusun menjadi suatu gambaran tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu. dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mulai mendapatkan gambaran mengenai Bagaimana lagu Tante Sun karya BIMBO dapat mengembalikan ingatan masyarakat terhadap kehidupan istri para pejabat pada masa Orde Baru. Langkah terakhir adalah historiografi (penulisan hasil penelitian). Pada tahap ini, peneliti telah mampu memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana lagu Tante Sun karya BIMBO dapat mengembalikan ingatan masyarakat terhadap kehidupan istri para pejabat pada masa Orde Baru.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dekonstruksi Peran Perempuan Pada Masa Orde Baru

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kesadaran kaum perempuan terhadap pentingnya peran perempuan di ranah publik mulai terbangun. Hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya berbagai organisasi perempuan, mulai dari yang berkontribusi terhadap perang fisik seperti Laskar Wanita Indonesia (LASWI) hingga terbentuknya Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang menjadi organisasi induk dari berbagai organisasi wanita di Indonesia (Sulasmi, 2021). Terbukanya pemerintah terhadap pendirian organisasi-organisasi perempuan Indonesia pada masa Orde lama mengakibatkan tumbuh dan menjamurnya organisasi perempuan. Hampir seluruh organisasi masyarakat baik yang bergerak di bidang sosial maupun politik, memiliki sayap organisasi yang menampung istri dari para aktivis tersebut. Hal tersebut mendorong kaum wanita untuk lebih aktif dalam menyuarakan kepentingannya.

Kemunculan sosok aktivis wanita yang tidak hanya bergerak di bidang sosial namun juga bergerak di bidang politik pada masa Orde Lama menyebabkan Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mengambil sikap berhati-hati terhadap gerakan kaum wanita di Indonesia. Pengaruh besar organisasi-organisasi sosial politik perempuan yang ada pada masa Orde Lama turut mendorong berbagai upaya dekonstruksi peran Perempuan pada masa Orde Baru. Konstruksi peran dan fungsi perempuan pada masa Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari konstruksi masyarakat tentang peran Perempuan yang telah dibentuk pada masa lalu. Oleh karena itu, konstruksi peran Perempuan merupakan hasil penggabungan antara nilai-nilai tradisional dengan modernisasi ala barat yang disesuaikan dengan kepentingan negara. Salah satu nilai-nilai tradisional yang mendominasi makna Perempuan pada masa Orde Baru adalah nilai dan budaya Jawa. Sebagai keluarga dengan kultur budaya yang kuat, Soeharto menggunakan nilai dan budaya Jawa sebagai pondasi awal budaya nasional.

Dominasi budaya Jawa dalam pembentukan budaya nasional pada Masa Orde Baru, menjadikan Indonesia seolah merupakan sebuah keluarga Jawa yang besar. Meskipun mendapatkan banyak kritik mengenai praktek Jawanisasi politik Indonesia, namun upaya menjawabkan Indonesia tetap berlangsung selama berpuh-

puluh tahun. Menurut Niel Mulder dalam Erika (Yuastanti, 2016), jawanisasi merupakan istilah dari pemaksaan penggunaan pola pemikiran dan perilaku Jawa seluruh Indonesia, baik secara sadar maupun tidak sebagai bentuk imperialisme kebudayaan. Proses internalisasi budaya Jawa ke dalam masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru menjadikan budaya Jawa sebagai alat untuk memandang setiap fenomena dan peristiwa yang terjadi di Indonesia. Tata kehidupan keluarga Jawa yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru ikut mempengaruhi bagaimana konsep dan peran Perempuan dibentuk pada masa Orde Baru.

Dalam kultur Jawa, Perempuan dikonstruksikan sebagai sosok ibu yang menjaga keseimbangan (kerukunan) dalam rumah tangga dan masyarakat. keterlibatan Perempuan dalam ruang publik digambarkan dalam upacara slametan. Dalam upacara slametan,, sosok Perempuan memang sebatas mengurus makanan, namun sebagai seorang Nyonya rumah, seorang Perempuan dituntut untuk memiliki sikap arif dan bijaksana, terutama ketika para tetangga ikut membantunya dalam pelaksanaan kegiatan slametan. Sikap hati-hati, arif dan bijaksana tersebut tercermin dalam pemberian ucapan terima kasih kepada tetangga yang membantunya. Ucapan terima kasih tersebut tidak lagi berbentuk uang, tetapi makanan.

Risa (Permanadeli, 2015) menjelaskan bahwa memberikan makanan dianggap lebih arif ketimbang memberikan uang sebagai bayaran atas bantuan tulus yang diberikan. Selain itu, pemberian makanan merupakan symbol dari pelaksanaan fungsi Perempuan sebagai penjaga keseimbangan rumah tangga dan masyarakat. Melalui pemberian makanan tersebut, Nyonya rumah dianggap menunjukkan sikap peduli terhadap keluarga tetangganya.

Sesuai dengan kultur Jawa yang dianut oleh Pemerintah Orde Baru, kemampuan Perempuan dalam menjaga keseimbangan antara ruang domestik dan publik kemudian didekonstruksikan ke dalam satu konsep baru yaitu, ibuisme negara. Menurut Julia Suryakusuma (Suryakusuma, 2011), Ibuisme negara adalah ideologi gender yang menciptakan setereotipe kaku-baku dan bersifat sangat membatasi, karena tujuannya memang untuk mengontrol dan menciptakan suatu tatanan hirarkis. Ideologi ini mengandung unsur-unsur yang mendomestifikasi peran perempuan. Dalam ibuisme negara, perempuan seolah-olah digambarkan memiliki peran aktif dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan politik, namun pada dasarnya Pemerintah bermaksud untuk mengontrol gerakan dan peran perempuan dalam ranah publik.

Upaya dekonstruksi peran perempuan melalui konsep ibuisme negara tersebut didukung oleh berbagai surat kabar yang terbit pada masa itu terutama yang memiliki rubrik khusus perempuan. Berbagai surat kabar tersebut berlomba-lomba mendomestifikasi peran dan fungsi perempuan. Seperti yang dicitrakan oleh surat kabar Haluan yang memiliki rubrik khusus wanita bernama Wanita dan Duniaya, dalam surat kabar Haluan yang terbit pada tahun 1978, terdapat salah satu artikel

yang berjudul “Istri Harus Mampu Menghayati Tugas Suami” (HALUAN, 1978) Dalam artikel tersebut, dituliskan bahwa seorang istri yang bijaksana haruslah memberikan kebahagiaan dan ketenangan kepada suami. Tidak hanya itu, dituliskan juga bahwa untuk menghindari percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga, istri harus memahami sifat dan menghayati tugas suami. Artikel tersebut menekankan bahwa tugas menjaga kedamaian dan ketenangan rumah tangga adalah tugas seorang istri. Dari artikel tersebut, dapat dilihat bahwa sistem Orde Baru menekankan bahwa peran ideal seorang perempuan adalah mendampingi suaminya.

Penerapan ibuisme negara di Indonesia kemudian diterapkan dalam organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru yaitu; PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan Darma Wanita yang merupakan organisasi istri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kedua organisasi ini beranggotakan kaum ibu dan istri yang memfokuskan diri pada peran dan kepentingan domestik perempuan. Sehingga, meskipun dianggap bermanfaat bagi masyarakat, namun keberadaan PKK dan Darma Wanita justru memperkuat domestifikasi kaum perempuan (Seda, 2015). Menguatnya domestifikasi peran dan fungsi perempuan melalui organisasi PKK dan Darma Wanita berdampak pada terbentuknya konsep perempuan ideal Orde Baru, yaitu Perempuan yang mampu memiliki peran ganda, yaitu perempuan yang mampu berperan sebagai ibu di dalam rumahnya dan istri yang mendampingi peran suaminya. Hal tersebut mendorong sebuah gambaran mengenai emansipasi semu perempuan Indonesia.

B. Kehidupan Istri Pejabat pada Masa Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kampanye mengenai fungsi dan peran ganda perempuan di Indonesia tidak hanya melalui surat kabar atau televisi, namun juga melalui pembentukan dua organisasi perempuan yaitu PKK dan Darma Wanita. Melalui kedua organisasi tersebut, ibuisme negara ditanamkan ke lingkungan terkecil kehidupan perempuan di Indonesia.. Baik Darma Wanita maupun PKK keduanya memiliki struktur kepangkatan yang mengikuti kepangkatan suami. Dalam Darma Wanita yang menaungi Istri Pegawai Negeri Sipil, Istri Pegawai Bank Milik Negara, Istri Pegawai BUMN, Istri Pegawai BUMD, Istri ABRI dan Pejabat Pelaksana di sektor pemerintahan terkecil, istri menteri secara otomatis menjadi kepala Darma Wanita di tingkat kementerian dan dipimpin oleh suaminya. Hal tersebut berlaku pula sampai ke tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan (Fatimah, 2021).

Organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki struktur organisasi yang tidak jauh berbeda dengan Darma Wanita. Jika Darma Wanita merupakan organisasi yang diisi oleh istri dari Pejabat Tinggi, PKK merupakan perkumpulan istri di tingkat akar rumput. Dalam PKK, istri Kepala Desa menjadi ketua dengan suaminya bertindak sebagai Pembina organisasi. Sebagai organisasi yang berada di bawah arahan pemerintah pusat, program-program kerja PKK merupakan turunan program Pembangunan Orde Baru seperti ketahanan pangan

keluarga, gotong royong dalam masyarakat sampai kepada perumahan dan tata laksana rumah tangga (Amaliatulwalidain & Kencana, 2019).

Dalam Pemerintahan Orde Baru yang sarat dengan budaya jawa, maka salah satu tugas penting dari kedua organisasi perempuan tersebut adalah menanamkan citra perempuan jawa sebagai identitas nasional. Pencitraan perempuan jawa tersebut tidak hanya terlihat dari program-program kerja saja, namun juga dari penggunaan kebaya dalam acara-acara resmi PKK dan Darma Wanita.. Perempuan jawa dicitrakan sebagai sosok perempuan sederhana yang senantiasa mendampingi suaminya. Namun dalam prakteknya yang terjadi justru berlawanan. Citra perempuan sederhana tidak terlihat dalam keseharian istri-istri pejabat Orde Baru.

Kehidupan mewah yang dinikmati oleh pejabat pemerintah Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan ekonomi Orde Baru. Hill (Hill, 1994) melihat bahwa proses pembangunan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru mulai terlihat signifikan seiring dengan terjadinya oil boom yang melanda Indonesia pada awal tahun 1970-an. Devisa yang dihadirkan melalui penjualan minyak tersebut menjadi sumber utama dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya Industri di Indonesia. Demi mendukung program pembangunan ekonomi, pemerintah Orde Baru membuka peluang investasi baik bagi investor dari dalam maupun luar negeri. Tidak hanya menggandeng investor swasta, pemerintah juga melibatkan para pejabat militer terutama yang telah lama memiliki hubungan dekat dengan Presiden Suharto.

Berdasarkan penjelasan Robinson (Robinson, 2012), keterlibatan pejabat militer sebagai pemimpin BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tersebut merupakan bagian sistem kapitalisasi korporasi negara. Studi kasus yang cukup terkenal di Indonesia adalah Bulog dan Pertamina. Dua korporasi tersebut merupakan korporasi yang dianggap paling strategis. Sepanjang tahun 1967-1973, Bulog dipimpin oleh Jenderal Achmad Tirtosudiro yang sebelumnya merupakan perwira kostrad yang dekat dengan Suharto. Sedangkan Pertamina dipimpin oleh Ibnu Sutowo yang dipilih langsung oleh Suharto. Kedua pemimpin korporasi tersebut tidak melapor kepada kementerian atau DPR namun langsung melapor kepada Presiden. Kewenangan yang diberikan kepada pejabat-pejabat pilihan Suharto meliputi penetapan harga pasar, pembelian dan pengadaan, perjanjian bisnis kerja dan pemasaran.

Keterlibatan pejabat militer dalam bidang ekonomi membuka peluang bagi keluarga terdekat di lingkaran para pejabat militer dan Presiden untuk membangun jaringan bisnis di berbagai bidang. Jaringan bisnis yang terbangun turut melibatkan etnis Tionghoa yang selama masa Orde Baru tidak mendapatkan kesempatan untuk berurusan dengan gerakan politik, namun mendapatkan peluang yang besar dalam bidang pembangunan ekonomi. Situmorang (Situmorang, 2009) melihat bahwa keterlibatan lingkaran kerabat dekat Suharto dan etnis Tionghoa tidak hanya berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, tapi turut andil dalam

menciptakan konglomerasi di Indonesia. Adapun konglomerat yang mulai muncul pada masa Orde Baru adalah Liem Sioe Liong pemilik Salim Group (Bank BCA, Bogasari, Indofood), Eka Cipta Widjaya pemilik Sinar Mas Group, Bob Hasan, Bambang Trihatmodjo Putera Suharto pemilik Bimantara Group, Tommy Suharto pemilik Humpuss Group, dan lain-lain.

Kemunculan konglomerat dan orang-orang kaya baru yang berada di lingkaran pemerintah Orde Baru mendorong munculnya gaya hidup bermewah-mewahan. Gaya hidup mewah tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh para pejabat dan para konglomerat saja, namun juga oleh keluarga, terutama istri dan anak-anaknya. Mochtar Lubis (Lubis, 1977) menyatakan bahwa gaya hidup orang kaya pada masa Orde Baru meniru kehidupan orang-orang asing yang gemar tinggal di rumah mewah, mengoleksi barang antik dan menggunakan mobil mercedes-benz dan volvo. Symbol lain dari orang kaya baru di Jakarta adalah golf. Lapangan golf membuka peluang besar bagi mereka yang ingin belajar mengenal dan mengembangkan hubungan dengan pembesar dan penguasa.

Gaya hidup mewah keluarga pejabat kaya Orde Baru juga diperlihatkan dengan kebiasaan mereka yang seringkali berwisata ke luar negeri, makan di restoran mewah dan menonton peragaan busana. Kebiasaan pergi jalan-jalan keluar negeri dan gaya hidup kebarat-baratan bagi istri pejabat juga diperlihatkan oleh Kartika Tahir yang merupakan istri kedua dari Haji Tahir. Haji Tahir dianggap sebagai orang nomor dua di Pertamina karena bekerja sebagai asisten Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo. Kartika Tahir atau Kartika Ratna diketahui gemar menghadiri berbagai pesta di Singapura dan pada akhirnya memilih menetap di Singapura (Media Indonesia, 1991).

Bagi kaum istri, menonton peragaan busana dan berlomba-lomba untuk tampil cantik bukan lagi sekedar gaya hidup, namun merupakan sebuah kebutuhan. Wulan Tilaar, Vice Chairwoman Martha Tilaar Group menceritakan kepada wartawan Female Daily, bahwa di awal Martha Tilaar mendirikan salon di rumahnya yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat, banyak ibu-ibu pejabat yang menjadi pelanggan tetap di salon yang tidak hanya menyediakan make up dan perawatan rambut tapi juga menyediakan body spa (Anne, 2016). Salon kecantikan yang didirikan oleh Martha Tilaar kemudian berkembang menjadi salah satu Perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia dengan nama brand Sariayu. Dalam mendirikan Sariayu, Martha Tilaar menjalin kerjasama dengan keluarga pengusaha tionghoa pemilik Kalbe Group, Theresia Harsini Setiady.

C. Tante Sun : Kembalinya ingatan masyarakat tentang kehidupan istri pejabat pada masa Orde Baru

Suharto dengan Orde Barunya merupakan pemerintahan yang paling lama berkuasa di Indonesia. Meskipun mampu bertahan selama 32 tahun, sepanjang kepemimpinannya, Suharto banyak mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan

masyarakat, mulai dari mahasiswa, akademisi, sastrawan hingga seniman. Upaya Suharto dalam membangun ekonomi Indonesia justru menjadi titik yang paling sering mendapatkan kritik tajam dari masyarakat. Banyaknya kritik terhadap jalannya pemerintahan direspon Orde Baru dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap otoriter, salah satu yang cukup sering ditemukan adalah berita mengenai pembredelan sebuah surat kabar atau pencekalan terhadap karya akademisi maupun sastrawan dan seniman. Hal tersebut justru mendorong para seniman dan sastrawan berlomba-lomba mengkritik kebijakan pemerintah Orde baru dengan bahasa-bahasa sindiran, kiasan yang terselip dalam novel, cerpen, puisi atau lagu.

Salah satu lagu yang sempat dicekal selama masa pemerintahan Orde Baru adalah Lagu Tante Sun karya grup music BIMBO. Lagu Tante Sun yang dirilis pada tahun 1977 tersebut dianggap menyindir ibu Tien Suharto (Siti Hartinah) yang merupakan istri Presiden Suharto, pemimpin Orde Baru. Sam Bimbo yang diwawancarai oleh Najwa Sihab menyatakan bahwa memang betul lagu tersebut ditujukan kepada Ibu Tien, tapi tidak hanya ibu Tien saja, namun kepada istri pejabat Orde Baru. Menurut Sam, para istri tersebut memiliki kekuasaan yang lebih dominan daripada suaminya (Metro TV-Mata Najwa, 2016). Adapun lirik lagu Tante Sun yang sempat dicekal adalah sebagai berikut;

Tante Sun

*Tante Sun, oh, Tante Sun
Tante yang manis
Tiap pagi giat berolahraga
Pergi bermain golf
Hingga datangnya siang
T'rus ke salon
Untuk mandi susu

Tante Sun, oh, Tante Sun
Tante yang giat
S'gala rapat dan berbagai arisan
Pagi, siang, dan malam
Tak pernah terlewatkan
Oh, Tante Sun
Oh, Tante teladan

Batu zamrud, berlian, dan kerikil
Emas hingga besi beton bisnisnya
Cukong-cukong dan tauke
Direktur dan makelar
Tekuk lutut karena Tante Sun*

*Tante Sun, oh, Tante Sun
Tante yang kaya
Tidak pernah merasa kesusahan
Senyum kiri dan kanan
Memikat tua-muda
Oh, Tante Sun
Oh, Tante, Tante Sun*

Sumber: [Musixmatch](https://musixmatch.com/lyrics/tante-sun)

Penulis lagu: Djaka Purnama H.k / Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah

D. Lirik Lagu Tante Sun Mengembalikan Ingatan Masyarakat Terhadap Kehidupan Istri Pejabat Orde Baru

Lagu Tante Sun karya Bimbo dirilis pertama kali pada tahun 1977 dan kembali populer di tahun 2020 bersamaan dengan BIMBO yang merilis ulang Lagu Tante Sun di sebuah platform music bernama spotify. Perilisan Lagu Tante Sun di tahun 2020 mampu mengembalikan dan menciptakan ingatan masyarakat terhadap bagaimana kehidupan istri pejabat Orde Baru. Adapun lirik-lirik yang dianggap menyindir kehidupan istri pejabat pada masa Orde Baru adalah;

1. *Tante Sun, oh, Tante Sun, Tante yang manis. Tiap pagi giat berolahraga pergi bermain golf hingga datangnya siang, t'rus ke salon untuk mandi susu.*

Olahraga golf telah sejak lama diidentifikasi sebagai olahraga yang diperuntukan bagi kalangan atas. Bagi pejabat Orde Baru, Golf tidak hanya berfungsi sebagai rekreasi dan kesenangan, namun menjadi sarana *lobbying*. Dengan bermain Golf, para eksekutif Perusahaan dapat berekreasi sambil *lobbying* dengan pejabat pengambil keputusan di sebuah instansi pemerintah. menurut harian Neraca, tidak jarang seorang pemimpin BUMN atau instansi pemerintah lainnya datang siang karena mereka terlebih dahulu berada di lapangan golf untuk urusan bisnis (Harian Neraca, 1989). Keterlibatan istri pejabat dalam kegiatan golf ditunjukkan oleh istri dari gubernur DKI Jakarta, Ibu Suprpti Suprpto yang hadir langsung ke lapangan golf untuk meresmikan wisma golf yang baru dibangun di Pondok Indah (Berita Yudha, 1983).

Hobi bermain bermain golf tidak hanya berlaku bagi istri-istri pejabat, tapi perempuan kelas atas seperti pengusaha perempuan ternama di Indonesia, ibu Mooryati Soedibyo yang memiliki brand kosmetik Mustika Ratu juga mengakui bahwa salah satu hobinya adalah bermain golf (Bainar, 1997). Tidak hanya bermain golf, salon-salon kecantikan dan istri-istri pejabat tidak dapat dipisahkan. Produk kecantikan berupa alat make up maupun baju telah menjadi bagian dari kehidupan istri-istri pejabat pada masa Orde Baru. Hal tersebut secara tersirat diakui oleh Wulan Tilaar, Vice Chairwoman Martha Tilaar Group ketika menceritakan proses

berdirinya Martha Tilaar yang berawal dari salon kecil di daerah Menteng, Jakarta Pusat (Anne, 2016).

2. Batu zamrud, berlian, dan kerikil Emas hingga besi beton bisnisnya. Cukong-cukong dan tauke, Direktur dan makelar Tekuk lutut karena Tante Sun.

Pada masa Orde Baru, keterlibatan seorang istri dalam jaringan bisnis yang dibangun oleh suaminya sudah menjadi hal yang dianggap wajar. Menurut Sam Bimbo, istri pejabat pada masa itu seringkali terlibat dalam urusan bisnis yang dijalankan oleh suaminya (Metro TV-Mata Najwa, 2016). Ketika dikaitkan dengan sosok Bu Tien yang merupakan istri dari Presiden Soeharto, lirik lagu ini sangat relevan. Meskipun tidak terlibat secara langsung, anak-anak Bu Tien mulai dari anak pertamanya, Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut) sampai anak bungsunya Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek) memiliki jaringan bisnis yang luas, mulai dari Pertelevisian, Resort dan Hotel, Otomotif, sampai Energi dan Tambang (Robinson, 2012).

3. Tante Sun, oh, Tante Sun, Tante yang kaya, tidak pernah merasa kesusahan.

Gambaran kehidupan istri pejabat pada masa Orde Baru yang hidup dalam kemewahan menjadi pemandangan yang biasa, mulai dari kegiatan main golf, mengunjungi salon-salon kecantikan ternama, menonton pertunjukan atau pagelaran busana, sampai jalan-jalan keluar negeri. Gambaran hidup mewah istri pejabat terlihat dari sosok istri Haji Tahir (Asisten Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo). Sosok Kartika Tahir yang sempat bersengketa dengan Pertamina terkait harta kepemilikan Ibnu Sutowo di BANK Sumitomo Singapura, dikenal sering pulang pergi dan jalan-jalan keluar negeri. Bahkan di Singapura, Kartika diketahui tinggal di sebuah apartemen mewah (Media Indonesia, 1991).

Lirik lagu Tante Sun yang dianggap relevan dengan kehidupan pejabat pada masa Orde Baru dapat dijadikan sebagai sebuah monumen dalam mengembalikan, bahkan mereproduksi ingatan masyarakat yang ada pada hari ini mengenai bagaimana kondisi kehidupan sosial-ekonomi istri pejabat pada masa Orde Baru yang hidup dalam kemewahan, terlibat dalam berbagai bisnis dan korupsi suaminya. Upaya rekonstruksi ingatan menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan, karena ingatan bukan sekedar menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang. Ingatan mampu menjaga manusia untuk tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pada masa lalu, agar tidak terulang kembali di masa datang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Orde Baru merupakan sistem pemerintahan yang paling lama bertahan memimpin Indonesia. selama 32 tahun berkuasa, Soeharto tidak hanya mampu membangun ekonomi dan infrastruktur Indonesia, namun juga membentuk paradigma berpikir manusia Indonesia. Tumbuh besar dalam budaya jawa, Suharto membentuk Indonesia selayaknya

sebuah keluarga Jawa dengan budaya Jawa sebagai alat untuk memandang setiap permasalahan di Indonesia. Upaya Suharto dalam menjawab Indonesia dikenal dengan Jawanisasi.

Jawanisasi yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru mendorong dekonstruksi besar-besaran mengenai peran dan fungsi perempuan Indonesia. Sebelum Indonesia Merdeka, perempuan Indonesia telah aktif dalam berbagai medan pertempuran, baik yang sifatnya fisik maupun ide dan gagasan. Hal tersebut tetap berkembang sampai pada masa Orde Lama. Perempuan tidak hanya bebas menyuarakan pendapatnya, namun dikenal kritis dalam menyoroti permasalahan sosial. Pada masa Orde Baru, konsep perempuan Indonesia merujuk kepada bagaimana sosok perempuan dalam kacamata Jawa.

Dalam sudut pandang Jawa, perempuan sebagai sosok ibu memiliki peran ganda yaitu sebagai penjaga keharmonisan rumah tangganya dan masyarakat. Namun, menjaga keharmonisan tersebut dalam rangka tugas-tugas yang sifatnya domestik. Menggunakan Ibuisme Negara, Orde Baru mendomestifikasi peran perempuan Indonesia. Keberadaan perempuan Indonesia tidak lebih dari sekedar pendamping suaminya. Meskipun dalam praktek kesehariannya, pada masa Orde Baru banyak ditemukan perempuan yang bekerja di luar rumah, namun citra perempuan yang baik pada masa Orde Baru adalah perempuan yang mampu menjadi ibu dan istri yang mendampingi suaminya, hal tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan PKK dan Darmawanita.

Konsep baru mengenai perempuan Indonesia turut mempengaruhi bagaimana kehidupan istri pejabat di Indonesia. Mayoritas istri pejabat Orde Baru baik yang terlibat dalam urusan sosial, bisnis ekonomi sampai politik, tetap menggunakan nama suami di belakang namanya, seperti istri Gubernur DKI Jakarta, Ibu Suprpti Suprpto, atau Ibu Negara, Siti Hartinah yang lebih dikenal dengan nama Tien Suharto. Keterlibatan istri pejabat Orde Baru dalam bisnis yang dijalankan oleh suaminya mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk seniman. Kritik tersebut tidak hanya bicara tentang jaringan bisnis yang dibangun oleh para istri pejabat tersebut, namun juga mengenai gaya hidup bermewah-mewahan.

Salah satu seniman dan Musisi yang hadir untuk mengkritik gaya hidup mewah istri-istri pejabat Orde Baru adalah BIMBO. Sam Bimbo menciptakan lagu Tante Sun dan dirilis pada tahun 1977. Lagu tersebut sempat dicekal oleh pemerintah Orde Baru karena dianggap menyindir kehidupan Ibu Negara Indonesia, Tien Suharto yang anak-anaknya diketahui oleh masyarakat memiliki jaringan bisnis yang luas.

Lagu Tante Sun yang dirilis pada tahun 1977 tersebut kembali dirilis di Spotify, sebuah platform music pada tahun 2020 mampu mengembalikan ingatan masyarakat mengenai gaya hidup istri pejabat Orde Baru. Lagu tersebut tidak hanya mengembalikan, namun mereproduksi ingatan generasi Z yang belum lahir pada masa Orde Baru. Lirik lagunya yang menyindir gaya hidup bermewah-mewahan istri pejabat juga seolah dianggap masyarakat masih relevan untuk digunakan sebagai sarana mengkritik istri-istri pejabat Indonesia yang belum lama ini banyak dipanggil KPK (Komite Pemberantas

Korupsi) mendampingi suaminya. Upaya reproduksi ingatan merupakan suatu hal yang penting, karena ingatan bukan hanya jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, namun juga digunakan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya pengulangan kesalahan yang pernah dilakukan pada masa lalu, agar tidak dilakukan pada masa sekarang dan masadepan.

DAFTAR REFERENSI

- Amaliatulwalidain, d. (2019, Januari). Peran Politik Gerakan Perempuan Dari Masa ke Masa (Studi : Tentang Sejarah Organisasi PKK di Indonesia). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global*, 04, No. 01, 1-6.
- Anne. (2016, Agustus 19). Brand History : Sariayu.
- Axcell Nathaniel, d. (2018). Analisa Semiotika Makna Kesendirian Pada Lirik Lagu "Ruang Sendiri" Karya Tulus. *Semiotika*, 19, No. 02, 107-117.
- Bainar, D. H. (1997). *Kiat Sukses Wanita Indonesia*. Jakarta: Institut Pengembangan Pembinaan Sumber Daya Manusia-Warna Indonesia.
- Bayu Asiadhi Putra, d. (2019). Topeng Ireng dan Memori Budaya : Studi Kasus Transmigran Jawa di Samarinda. *SESANTI (Seminar Bahasa, Sastra dan Seni)*, 36-49.
- Berita Yudha. (1983, November 28). Wisma Golf Pondok Indah Bernilai Tiga Milyar Rupiah.
- Fatimah, S. (2021). *Negara dan Perempuan : Representasi Politik Perempuan Masa Orde Baru*. Depok: Rajawali Pers.
- Gottschalk, L. (2015). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI-Press.
- Halbwachs, M. (1980). *The Collective Memory*. Harper Colophon.
- HALUAN. (1978, Oktober 1). Istri Harus Mampu untuk Menghayati Tugas Suami.
- Hamid, A. (2015). Pengalaman, Ingatan dan Sejarah : Kisah Empat Pelaut Buton. *WALASUJI*, 06, No. 01, 1-15.
- Harian Neraca. (1989, Mei 16). Prestasi Menurun, Impor Bola Golf Juga Menurun.
- Hill, H. (1994). *Indonesia New Order : The Dynamics Of Socio-Economic Transformation*. Australia: Allen & Unwin.
- Hoed, B. H. (2014). *Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kencana, A. W. (2019, Januari). Peranan Politik Gerakan Perempuan Dari Masa Ke Masa (Studi : Tentang Sejarah Organisasi PKK di Indonesia). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global*, 04, No.01, 1-6.

- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lubis, M. (1977, Mei 5). Jakarta Kota Penuh Kontras. *Prisma*.
- Media Indonesia. (1991, September 3). Memburu Kartika di Singapura.
- Metro TV-Mata Najwa. (2016, Juli 16). Panggung Bimbo (Video Youtube) - <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=x57ZQqTSpcg>.
- Nuryana Yusup, d. (2021). Membangun Ingatan Kolektif Masyarakat Desa Sukamanah Terhadap Sejarah Islam Lokal: Sejarah Pondok Pesantren Sukamanah Cibitung. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung, I, No. 53*, 143-157.
- Permanadeli, R. (2015). *Dadi Wong Wadon : Representasi Sosial Perempuan Jawa Di Era Modern*. Sleman: Pustaka Ifada.
- Rigney, A. (2015). *Cultural Memory Studies*. Routledge International.
- Robinson, R. (2012). *Suharto & Bangkitnya* . Jakarta: Komunitas Bambu.
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya, 11, No. 2*, 71-80.
- Said, T. (1988). *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Seda, F. S. (2015). *Perempuan : Perspektif Sosiologi Gender* . Jakarta: UI-Press.
- Situmorang, J. R. (2009). Beberapa Keterkaitan Antara Politik dan Bisnis. *Jurnal Administrasi dan Bisnis, 5, No. 2*, 146-159.
- Sulasmi, E. (2021). *Perempuan Dalam Dinamika Sosial Modern*. Medan : UMSU Press.
- Suryakusuma, J. (2011). *Ibuisme Negara : Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Depok: Komunitas Bambu.
- Tosh, J. (1984). *The Pursuit Of History*. United States Of america: Longman Group.
- Wijaya, R. A. (2014). Kritik Sosial Dalam Lagu Iwan Fals Periode Tahun 1980-1992. *Jurnal Buana Sastra, I, No. 1*.
- Yambeyapdi, E. (2018). Papua : Sejarah Integrasi Yang Diingat dan Ingatan Kolektif. *Indonesia Historical Studies, 02, No. 02*, 89-95.
- Yuastanti, E. (2016, Juli 2). Gaya Busana Siti Hartinah Soeharto sebagai Ibu Negara Indonesia Tahun 1968-1996. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, 4, No.2*, 563-577.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia